

Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Putri Salsabila Indrawan Lubis¹, Rofila Salsabila²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : putrisalsabila1103@gmail.com rofilasalsabila17@gmail.com

Abstract There are various classes for firms in Indonesia, according legal rules. Businesses can be classified into four categories: enormous, micro, small, and medium. The government refers to the three primary categories of businesses as UMKM, or micro, small, and medium enterprises. For this reason, "Micro, Small, and Medium Enterprises" is what the abbreviation UMKM stands for. MSMEs are governed under Law No. 20/2008 on "Micro, Small, and Medium Enterprises". The existence of MSMEs makes it easier for people across Indonesia to fulfill these needs. MSMEs play an important role in encouraging employment, economic growth, and reducing social inequality. In addition, MSMEs are essential to solving a number of challenges facing the nation's economy. MSMEs still face various obstacles and constraints in carrying out this task, so they cannot realize their full potential and contribution in social and economic activities. The community, the banking sector as a source of credit, and the government as a policy maker must fully participate in finding solutions.

Keywords: MSMEs, Economic Development

Abstrak Ada berbagai kelas untuk perusahaan di Indonesia, sesuai dengan aturan hukum. Bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: besar, mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah menyebut tiga kategori utama bisnis sebagai UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk alasan ini, "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" adalah singkatan dari UMKM. UMKM diatur dalam UU No. 20/2008 tentang "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Keberadaan UMKM memudahkan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. UMKM berperan penting dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, UMKM sangat penting untuk menyelesaikan sejumlah tantangan yang dihadapi perekonomian bangsa. UMKM terus menghadapi berbagai hambatan dan kendala dalam menjalankan tugas ini, sehingga mereka tidak dapat merealisasikan potensi dan kontribusinya secara maksimal dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Masyarakat, sektor perbankan sebagai sumber kredit, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berpartisipasi penuh dalam mencari solusinya.

Kata Kunci: UMKM, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Saat setiap tahun, jumlah UMKM di Indonesia meningkat dengan signifikan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi output. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya perkembangan UMKM di Indonesia. Meningkatkan perhatian dan pendampingan terhadap UMKM, yang telah terbukti tangguh dan mampu bertahan dari krisis keuangan tahun 1998, merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor UMKM memiliki kapasitas untuk mempekerjakan 88% tenaga kerja dan menghasilkan 40% dari PDB.

Karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat, UMKM secara konsisten disebut-sebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bisnis-bisnis ini beroperasi di sektor tradisional dan modern. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM dipandang sebagai sektor bisnis yang tangguh karena dapat berkembang di

Received: November 29, 2023; Accepted: Januari 03, 2024; Published: April 30, 2024

* Putri Salsabila Indrawan Lubis, putrisalsabila1103@gmail.com

lingkungan apa pun. Meskipun tidak besar, talenta dan keterbatasan mereka terkadang dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja.

Salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal adalah pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM.

Semua aspek kehidupan negara yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dalam pembangunan nasional. Masyarakat adalah yang dikembangkan dan juga menjadi tujuan dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga, memimpin, memberi saran, dan juga menawarkan keuntungan. Agar terjadi pertumbuhan nasional, inisiatif masyarakat dan pemerintah harus saling melengkapi. Pembangunan di segala bidang harus dilakukan dengan fokus pada sektor ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan aspek pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas untuk mencapai tujuan ini. Peningkatan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan komponen penting dalam komunitas bisnis nasional, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. UMKM sering dianggap sebagai fondasi ekonomi karena menciptakan banyak lapangan kerja, membantu perluasan industri lain, dan memajukan inklusi sosial dan ekonomi.²

UMKM sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan ekspansi ekonomi secara umum. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat penting bagi banyak aspek ekonomi suatu negara. UMKM merupakan fondasi ekonomi, memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi secara umum.³ Bagi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah, UMKM adalah sumber utama pekerjaan mereka. Selain menurunkan tingkat pengangguran, UMKM juga meningkatkan pendapatan keluarga melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi.⁴

¹ Puji Hastuti, et. al., *Kewirausahaan dan UMKM*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 155-156

² Khusniati Rofiah, "Peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten ponorogo", *Kodifikasia* 5.1 (2010): 147-168.

³ Muheramtohad, Singgih. "peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia." Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8.1 (2017): 65-77.

⁴ Paramita, Metti, and Muhammad Iskandar Zulkarnain. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2018). H. 4

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia secara berkelanjutan dan mandiri dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional adalah salah satu dari banyak aspek kehidupan bernegara dan berbangsa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Pembangunan masyarakat adalah kekuatan utama di balik pertumbuhan, tetapi tindakan pemerintah juga diperlukan untuk menjaga, membimbing, dan membangun lingkungan yang tenang, aman, dan aman bagi negara.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membentuk masa depan masyarakat sendiri. Perubahan positif dari standar hidup sebelumnya dibawa oleh pembangunan. Di era globalisasi, pemerintah menggunakan ekonomi sebagai barometer utama pembangunan.

Pembangunan tidak akan stabil jika tujuan utamanya terpusat, pertumbuhan yang tidak merata, serta lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak seimbang. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan akan terkena dampaknya, oleh karena itu mereka harus diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator tingkat pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Para peneliti ekonomi makro mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi sebagai tingkat kenaikan pendapatan per kapita, yang memberikan gambaran umum tentang keadaan ekonomi dan kesejahteraan penduduk suatu negara.

Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat dan kesempatan kerja adalah tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah harus dilibatkan dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan ekonomi, yang mencakup penciptaan dan perluasan ekonomi lokal serta pemanfaatan semua bantuan sumber daya yang tersedia.⁵

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi pembangunan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat penting bagi perekonomian bangsa. Hal ini dapat dilihat dari dominasi UMKM dalam perekonomian Indonesia, yang merupakan hasil dari beragamnya industri dan sektor ekonomi di Indonesia, kontribusinya terhadap PDB yang cukup besar, dan potensi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

⁵ Pujiono, *Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan*, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas, t.th., h. 320.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang membentuk sebagian besar volume bisnis dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM mencakup semua bentuk usaha, termasuk badan usaha kecil, perorangan, kelompok, dan rumah tangga yang menjalankannya. Sebagai negara berkembang, Indonesia memprioritaskan UMKM dalam sektor ekonominya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mandiri dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. UMKM digambarkan sebagai perusahaan, baik swasta maupun badan usaha, yang didirikan oleh warga negara. Dengan mendorong perekonomian lokal, UMKM memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi negara. Kemampuan UMKM untuk memberi manfaat dan mendistribusikan pendapatan ke seluruh masyarakat sangat penting bagi keberhasilan ekonomi bangsa.

Sebagai fondasi ekonomi global, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan pengembangan dan pemberdayaan yang signifikan, menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Salah satu pilar ekonomi nasional adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM mencakup 99% dari seluruh unit usaha, menyumbang 60,5% dari PDB, dan mempekerjakan 96,9% dari angkatan kerja.⁶

Industri padat karya dan bergantung pada sumber daya, termasuk pertanian tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran, lebih menguntungkan usaha mikro dan kecil. Dalam hal nilai tambah, usaha menengah di sektor kehutanan, jasa perusahaan, penyewaan, perhotelan, dan keuangan berkinerja baik. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan, penggalian, gas, energi, dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan pendapatan negara, perusahaan besar dan UMKM saling melengkapi dan bergantung satu sama lain.

Fakta ini semakin menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi yang berlangsung hingga tahun 1989 dan krisis kepercayaan. Mulyadi Nitisusastro menegaskan dalam sejumlah penelitian ekonomi bahwa kontribusi pelaku usaha kecil tidak menyebabkan perekonomian Indonesia lumpuh.⁷ Meskipun bisnis skala besar di

⁶ Wulansari, N., Wahyu, & Kurniawan, Y. (2017). Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM dan Good Governance di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, hal. 262-268.

⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 39.

semua sektor industri telah terkena dampak besar dari krisis, masyarakat telah mengakui peran yang dimainkan oleh bisnis UMKM.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Adnan Husada Putra, ekonomi kerakyatan diterapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Wujud nyata dari ekonomi kerakyatan berupa pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga hasil produksi mereka tidak hanya terjual di pasar lokal, namun juga ke luar negeri dan terus berkembang. Selain itu, lokasi dan waktu tidak lagi menjadi kendala dalam pemasaran produk karena penggunaan teknologi informasi. Selain itu, mereka yang bercita-cita menjadi pengusaha dari perusahaan kecil hingga menengah dapat menemukan peluang baru tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari bisnis di masyarakat dan dengan dukungan pemerintah. pengembangan perusahaan baru, perluasan perusahaan yang sudah ada, dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat. Keterlibatan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi studi literatur, di mana literatur yang relevan ditemukan melalui membaca dan mengumpulkan literatur yang ada. Sehingga dengan cara tersebut dapat ditemukannya permasalahan yang ingin diselesaikan. Cara pengumpulan data :

1. Mengumpulkan topik bersangkutan dengan penelitian yang akan menjadi data primer,
2. Menelusuri topik-topik lain yang memiliki sangkutan dengan masalah yang dicari dan menjadi data sekunder.

KAJIAN TEORITIS

A. UMKM

Kelompok perusahaan utama dikenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rudjito menegaskan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam penciptaan bisnis dan lapangan kerja baru.⁹

⁸ Adnan Husadi Putra, "Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisis Sosiologi*, VOL 5, No.2, (Desember 2011), H. 41

⁹ Adiwarman A karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 22.

Cara perusahaan dikategorikan di lingkungan Indonesia mengarah pada UMKM. Hal ini sangat penting karena standar-standar ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan perusahaan terkait dirumuskan. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai UMKM dapat dilihat di Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2008 tentang UMKM. Usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang menguntungkan yang dilakukan oleh badan usaha swasta atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai usaha mikro berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut.¹⁰

Menurut definisi hukum, perusahaan kecil adalah perusahaan yang menguntungkan yang dijalankan secara independen oleh seseorang atau kelompok yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau terhubung dengan cara apa pun dengan divisi atau anak perusahaan perusahaan menengah atau besar. Sebaliknya, usaha mikro adalah perusahaan yang sukses dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang tidak memenuhi definisi hukum dan bukan bagian dari, dimiliki oleh, atau dikelola oleh perusahaan yang lebih besar yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai usaha mikro.

Kriteria berikut ini digunakan oleh undang-undang ini untuk mendefinisikan UMKM di bawah pasal 6 dengan menggunakan nilai atau aset bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan:

1. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan mikro memiliki aset tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah yang digunakan untuk operasi komersial, dan pendapatan penjualan tahunan kurang dari Rp300 juta.
2. Usaha kecil memiliki aset antara Rp 50 juta dan Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan struktur perusahaan, dan pendapatan tahunan antara Rp 300 juta dan Rp 2.500.000.
3. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki nilai bersih minimal.¹¹

Pandji Anoraga menjelaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuannya relatif sederhana dalam hal administrasi pembukuan, dan umumnya menyimpang dari praktik-praktik yang berlaku. Kadang-kadang pembukuan sudah ketinggalan zaman, sehingga menyulitkan untuk mengevaluasi operasi perusahaan.
- b. Karena persaingan yang ketat, margin bisnis biasanya sempit.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6

- c. Modal yang terbatas;
- d. Pengalaman manajerial yang terbatas dalam mengoperasikan organisasi perusahaan;
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil.¹²

Kategori UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan mata pencaharian: Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menciptakan lapangan kerja terkadang disebut sebagai kegiatan mata pencaharian. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) Usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlihat sebagai pengrajin tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan.
- 3) Usaha mikro, kecil, dan menengah yang dinamis dan berjiwa wirausaha yang mampu melakukan ekspor dan subkontrak.
- 4) Usaha cepat tumbuh, yang terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berpotensi tumbuh menjadi usaha besar (UB).¹³

Dari sudut pandang bisnis, UMKM dibagi menjadi empat kelompok:

- a. UMKM yang beroperasi di sektor yang tidak terorganisir
- b. UMKM mikro adalah UMKM yang memiliki keterampilan sebagai pengrajin tetapi tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan perusahaan mereka.
- c. Kelompok UMKM yang mampu berwirausaha melalui kolaborasi dan ekspor yang dikenal sebagai perusahaan kecil dan dinamis.
- d. UMKM yang memiliki kemampuan kewirausahaan dan kapasitas untuk tumbuh menjadi perusahaan besar dikenal sebagai perusahaan yang bergerak cepat.¹⁴

Usaha mikro, menurut Awalil Rizky, adalah perusahaan dengan total aset, omset, dan modal yang sangat kecil. Hanya sedikit usaha yang memiliki legitimasi bisnis, bank biasanya bukan sumber modal, lokasi usaha tidak selalu stabil, dan jenis komoditas yang dijalankan sering berubah-ubah.¹⁵

Menurut peraturan pemerintah, UMKM didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi kriteria aset atau nilai penjualan tertentu setiap tahunnya, seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. UMKM dimiliki dan dikelola oleh satu atau lebih warga negara Indonesia. UMKM, menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha Kecil dan

¹² Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32

¹³ Ade Rasalawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap pertumbuhan ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Syarifhidayatullah, Jakarta, 2001), h.31

¹⁴ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: BI dan LPPI, 2015), h. 13.

¹⁵ Awalil Rizky, *Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia*, Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan (Jakarta: BMT Permodalan, 2008), h. 50.

Menengah, adalah bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 200 orang dan aset di bawah Rp 10 miliar. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17/Per/M.KUKM/XII/2015, UMKM diklasifikasikan sebagai bisnis dengan total aset tidak lebih dari Rp500 juta (untuk usaha mikro), Rp10 miliar (untuk usaha kecil), atau Rp50 miliar (untuk usaha menengah).

Pemerintah dan organisasi lain sering menawarkan bantuan yang ditargetkan untuk pertumbuhan UMKM, termasuk pasar, bimbingan, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pembiayaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi inklusif, mengurangi pengangguran, dan mendorong perluasan UMKM.

UMKM memberikan sejumlah keuntungan yang dapat menjadi landasan pertumbuhan di masa depan, termasuk:

1. Penyediaan lapangan kerja UMKM dapat mempekerjakan hingga 50% tenaga kerja di industri kecil.
2. Telah terbukti bahwa keberadaan usaha kecil dan menengah mendorong ekspansi dan kemajuan calon pemilik usaha.
3. Menggunakan manajemen yang sederhana, mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, dan memiliki segmen pasar yang berbeda.
4. Menyajikan data yang menunjukkan kemampuan industri kecil untuk tumbuh dan mendorong pertumbuhan industri terkait.
5. Memiliki ruang untuk ekspansi.

Dua aspek yang menjadi fokus dari upaya pembinaan yang berbeda adalah kekurangan yang sering menjadi hambatan dan masalah bagi usaha kecil:

1) Masalah tradisional yang dihadapi UMKM meliputi elemen-elemen internal seperti:

a) Modal

Modal adalah komponen penting dari setiap organisasi karena memungkinkan organisasi tersebut berfungsi dan berkembang. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah yang paling rentan terhadap kekurangan uang tunai karena mereka adalah perusahaan otonom dengan akses terbatas ke pendanaan dari pemilik bisnis lain. Selain itu, pemilik bisnis kesulitan mengajukan pinjaman bank karena mereka tidak dapat menangani masalah teknis dan administratif.

b) Sumber Daya Manusia yang Tidak Memadai

Selain dikembangkan secara tradisional, perusahaan mikro dan kecil kadang-kadang dimulai sebagai bisnis keluarga yang diwariskan. Kendala ini dapat diamati melalui pendidikan formal dan informasi serta keterampilan yang akan mempengaruhi manajemen perusahaan.

Selain itu, sebagian besar usaha mikro dan kecil kesulitan untuk menggunakan teknologi kontemporer untuk membuat produk mereka lebih kompetitif.

c) Jaringan untuk Bisnis

Jaringan untuk Bisnis Keluarga mengelola sebagian besar perusahaan kecil, dan mereka biasanya kurang memiliki pengalaman industri dan koneksi profesional. Kepadatan penduduk dan kualitas barang yang diproduksi akan berdampak pada kemampuan jaringan bisnis untuk menjual barang dan jasanya, terutama jika mereka ingin memasuki pasar luar negeri.

2) Pengaruh eksternal termasuk hal-hal seperti ini yang dibawa oleh para pelatih dan pengembang UMKM:

a) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Pengembangan dan dukungan ekspansi bisnis terhambat oleh ketidaktahuan fasilitas infrastruktur terhadap kemajuan teknis dan pengetahuan. Semua aspek operasi bisnis, termasuk manajemen dan kuantitas serta kualitas produk yang dihasilkan, akan terpengaruh oleh hal ini.

b) Iklim Usaha

Barang-barang primer dan sekunder akan bersaing dengan barang-barang UMKM ketika mereka memasuki pasar. Dalam industri ini, terkadang masih ada persaingan fiktif antara bisnis besar dan kecil. Barang-barang tertentu akan didominasi oleh perusahaan besar, yang menyebabkan persaingan tidak sehat.

c) Otonomi Daerah

Daerah kini memiliki kendali penuh atas bagaimana mengatur dan menjalankan masyarakatnya berkat berlakunya otonomi daerah. Pungutan baru yang akan dibebankan kepada pelaku UMKM merupakan salah satu bentuk perubahan sistemik yang akan berdampak pada pelaku usaha ini. Selain itu, penerapan otonomi daerah terkadang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat, yang menyulitkan pihak luar dalam dunia bisnis untuk berekspansi.

d) Perdagangan Tanpa Batas

Munculnya persaingan bebas, terutama dalam perdagangan bebas, merupakan tanda globalisasi. Hal ini memberikan tekanan pada UMKM untuk memproduksi barang dan jasa dengan cara yang produktif dan efisien untuk memenuhi tuntutan pasar global dan standar kualitas internasional. Pada kenyataannya, perusahaan tidak dapat menandingi barang dan jasa yang ditawarkan oleh pesaing.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan di atas, UMKM harus tumbuh dan menjadi lebih kompetitif. Hal ini membutuhkan tindakan strategis. Pemerintah dapat

berkontribusi secara strategis dalam pengembangan UMKM dengan memberlakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu pertumbuhan mereka.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah yang menawarkan UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam kategori ekonomi yang sukses modal kerja dan/atau kredit/pembiayaan investasi. Pemerintah juga memanfaatkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), yang disediakan oleh kelompok tani dan koperasi, untuk mendukung proyek-proyek ketahanan pangan. Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) adalah pilihan lain yang membantu petani anggota memperoleh pendanaan usaha. Anggota PUAP terdiri dari rumah tangga petani, buruh tani, petani penggarap, dan petani pemilik. Selain itu, ada Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).¹⁶

Meningkatkan jumlah orang yang bekerja dengan jam kerja panjang di internal dan eksternal UMKM adalah langkah selanjutnya. UMKM eksternal adalah organisasi atau pemangku kepentingan yang mendukung UMKM, sedangkan UMKM internal adalah pelaku bisnis UMKM. Melalui program pelatihan dan penelitian yang mempermudah pembiayaan kepada UMKM, Bank Indonesia meningkatkan kapabilitas UMKM secara eksternal. Secara internal, UMKM meningkatkan sumber daya manusia mereka dengan meningkatkan dan menguasai teknologi yang digunakan dalam operasi mereka, terutama teknologi informasi (TI). Perusahaan yang menggunakan TI akan lebih mudah masuk ke pasar luar negeri.

Sebagai salah satu langkah dalam strategi pemberdayaan, pendidikan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM juga diperlukan. Keadilan sosial, yang mendorong kesetaraan sosial dan politik serta perasaan damai dalam masyarakat, adalah tujuan mendasar dari pemberdayaan. Efendi M. Guntur mendefinisikan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai perluasan kepemilikan elemen-elemen produksi, perluasan kontrol atas pemasaran dan distribusi, perluasan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, dan perluasan akses masyarakat terhadap pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Tugas-tugas ini perlu didekati dari berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang masyarakat dan kebijakan.¹⁷

Tiga kategori usaha kecil dan menengah di Indonesia adalah sektor negara, sektor swasta (yang dibagi lagi menjadi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perusahaan

¹⁶ Kementerian Luar Negeri RI, Masyarakat ASEAN, Majalah Edisi 12 Juni 2016, h. 20-21.

¹⁷ Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan* (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 6.

Perorangan, dan Perusahaan Internasional), dan sektor koperasi, menurut Soetrisni, sebagaimana dikutip oleh Edillius et al.¹⁸

Sebuah komentar dari Euis Amalia dalam Hasan Amin menyatakan bahwa korporasi dapat dikategorikan ke dalam salah satu kelompok berikut ini berdasarkan tanggung jawabnya:

- a. Perusahaan dengan pemilik yang memikul tanggung jawab penuh atas utang usaha, seperti perusahaan perorangan dan firma.
- b. Perseroan Terbatas dan bisnis lain yang pemiliknya tidak bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan.¹⁹

Menurut laporan Kelompok Ahli Usaha Kecil Menengah (Small Medium Enterprises/SME), yang dikutip oleh Euis Amalia, ada empat (4) kelompok UMK yang telah diidentifikasi di Indonesia dalam konteks APEC. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. UMK Grup A telah bergabung dengan pasar internasional. Mereka telah berkembang menjadi subkontraktor global untuk perusahaan multinasional, terutama di sektor otomotif dan listrik. Mereka telah berkembang menjadi subkontraktor untuk perusahaan global, terutama di sektor energi dan otomotif.
- b. UMK kelompok B telah berekspansi ke pasar luar negeri. Keberhasilan ekspor kelompok ini sebagian besar disebabkan oleh pesanan dari luar negeri, bukan karena dorongan pemasaran yang kuat.
- c. Meskipun Grup C belum pernah menjalankan bisnis di luar negeri, mereka memiliki banyak hal yang menjanjikan.
- d. Bagian dari UMKM yang tidak mengincar pasar luar negeri disebut sebagai Kelompok D. Kelompok terkuat di Indonesia adalah kelompok ini.

B. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan disadari untuk mencapai kemajuan yang saling berhubungan dalam segala hal. Pembangunan adalah kelanjutan dari apa yang belum dilakukan dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan. Proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk, bersama dengan penyesuaian yang signifikan terhadap struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan bagi warganya, dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

¹⁸ Edillius, et.all., *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.

¹⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2009), h. 47.

dan pembangunan saling terkait erat. Pertumbuhan ekonomi mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁰

Kegiatan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat; seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Lapangan pekerjaan yang dapat mempekerjakan seluruh tenaga kerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia belum mampu mencapai potensi penuhnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat lebih membutuhkan pengembangan potensi dan kualitas yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, baik di dalam diri mereka sendiri maupun di daerah mereka sendiri.²¹

Kata "pembangunan" dan "ekonomi" mengacu pada "pembangunan ekonomi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pembangunan, sedangkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan barang industri, pertanian, dan perdagangan.

Studi ini mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang secara progresif meningkatkan pendapatan per kapita riil warga suatu negara. Definisi ini memperjelas bahwa pembangunan ekonomi adalah hasil dari proses berkelanjutan yang meningkatkan dan menambah keadaan. Pendapatan riil perorangan diprediksi akan meningkat seiring dengan berlanjutnya pembangunan.

Untuk mencapai pembangunan nasional, pertumbuhan sektor ekonomi di setiap daerah di Indonesia harus disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan masing-masing daerah. Sebagai hasilnya, kemajuan secara keseluruhan akan tercapai.

Proses pembangunan yang dinamis dan tahan lama adalah pembangunan ekonomi. Apapun yang dilakukan, inovasi-inovasi tercermin dalam sifat kemajuan dan substansi dari proses tersebut, sehingga bukan merupakan gambaran statis dari perekonomian pada suatu saat tertentu. Pendapatan per kapita riil dan pendapatan total-lebih populer disebut sebagai pendapatan nasional-adalah dua komponen penting dan saling berhubungan dalam pertumbuhan ekonomi. Pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk adalah pendapatan per kapita.

Berikut ini adalah masalah-masalah pembangunan utama yang secara umum dihadapi Indonesia seiring dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009:

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h.67

²¹ Bachtiar Rifai, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" *Jurnal Sosio Humanniora*, Vol 3, No.4, (September 2012), h. 32.

- a. Besarnya persentase penduduk miskin dan pengangguran.
- b. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas.
- c. Kesenjangan pembangunan di Indonesia masih terjadi di berbagai kelompok, wilayah, dan tempat.
- d. sumber daya alam dan lingkungan menjadi semakin tidak sehat.
- e. Tidak adanya keadilan dan penegakan hukum.
- f. Kemungkinan terjadinya konflik horizontal dan tingginya angka kriminalitas.
- g. Rendahnya kemampuan Hankam dan ancaman separatisme.
- h. Lemahnya lembaga-lembaga demokrasi.

Karena pembangunan ekonomi dianggap sebagai proses yang kompleks yang melibatkan semua aspek dan kebijakan yang komprehensif, baik non-ekonomi maupun ekonomi, maka kelompok-kelompok pembangunan dan bidang-bidang mengadakan diskusi untuk mengamati dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan dan proses di mana kebijakan-kebijakan tersebut diadopsi.

Sejalan dengan itu, Todaro (1983) dalam Suryana (2000) menyatakan bahwa berikut ini adalah tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat minimum dan spesifik:

- a. Memperluas distribusi atau pemerataan kebutuhan dasar untuk hidup, seperti perumahan, perawatan kesehatan, dan lingkungan, serta meningkatkan pasokannya.
- b. Lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan material bagi seseorang dan negara, meningkatkan standar hidup juga berarti meningkatkan dan memperbaiki pendapatan, serta menawarkan pekerjaan, pendidikan yang lebih tinggi, dan lebih banyak perhatian pada nilai-nilai budaya manusia.
- c. Membebaskan semua orang dan bangsa dari perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya pada orang dan bangsa lain, tetapi juga pada sumber-sumber ketidaktahuan dan penderitaan, untuk memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial mereka.

Model-model pembangunan dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat kategori: model-model yang berfokus pada kebutuhan dasar, model-model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, model-model yang menciptakan lapangan kerja, dan model-model yang mengurangi kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan standar hidup setiap orang ke tingkat minimum dan, pada akhirnya, ke tingkat maksimum, semua model

pembangunan ini berusaha meningkatkan pasokan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja baru dengan pendapatan yang wajar, dan meningkatkan standar hidup.²²

PEMBAHASAN

A. Peran UMKM dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi

UMKM secara khusus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan output dan pangsa mereka terhadap pendapatan nasional. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan kontributor signifikan terhadap ekspansi ekonomi. Mereka memiliki kekuatan untuk meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan dan meningkatkan produksi, yang akan mempercepat kemajuan ekonomi. UMKM sering kali merupakan industri yang sangat produktif, termasuk spektrum usaha bisnis yang luas mulai dari jasa dan industri hingga pertanian. Mereka memproduksi berbagai macam barang dan jasa, mempekerjakan banyak orang, dan menghasilkan uang yang mendukung perekonomian negara.²³

UMKM juga sering menggunakan bahan baku dan sumber daya lokal, yang menghidupkan kembali perekonomian lokal dan memperkuat mata rantai pasokan di wilayah tersebut. UMKM bukan hanya menjadi penggerak ekonomi dalam arti luas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali perekonomian lokal dengan cara yang sangat berarti. Salah satu cara utama di mana mereka mencapai ini adalah melalui penggunaan bahan baku dan sumber daya lokal. UMKM cenderung bergantung pada aset-aset lokal, seperti bahan mentah, tenaga kerja setempat, dan jaringan pasokan lokal. Dengan demikian, mereka membantu mendukung komunitas lokal dengan menciptakan permintaan untuk produk-produk dan layanan yang tersedia secara lokal.²⁴

Selain itu, UMKM juga memperkuat mata rantai pasokan di wilayah tersebut. Mereka sering bermitra dengan penyedia lokal, produsen, dan pemasok, yang membantu menciptakan ketergantungan positif antara berbagai bisnis di komunitas tersebut. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi regional dengan mempromosikan kolaborasi antara pelaku usaha lokal. Peningkatan mata rantai pasokan ini juga dapat memberikan peluang bagi

²² Herriyanto, *Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Potensial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2008*, 2011, S1 Thesis, UAJY, h. 14-18

²³ Marlina, Lina, and Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya." *Jurnal Ecodemica* 2.1 (2018): 125-135.

²⁴ Ompusunggu, Dicky Perwira, dkk. "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4.1 (2023): 689-696.

pertumbuhan bisnis kecil dan menengah yang ada, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan memperkuat mata rantai pasokan di wilayah tersebut, UMKM bukan hanya menghasilkan keuntungan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga menghidupkan kembali komunitas lokal, menciptakan lapangan kerja, dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di tingkat regional.²⁵

1. Penciptaan lapangan kerja: Di banyak negara, UMKM merupakan sumber signifikan dari lapangan kerja yang baru diciptakan. Tingkat pekerjaan yang lebih tinggi di antara UMKM sering kali menghasilkan penurunan pengangguran dan lebih sedikit konflik sosial. International Finance Corporation (IFC) memperkirakan bahwa di sebagian besar negara, UMKM menyumbang 70-95 persen dari total lapangan kerja.
2. Mendorong ekspansi ekonomi lokal: UMKM meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, yang mendorong ekspansi ekonomi lokal. Efek pengganda dari partisipasi UMKM dalam rantai pasokan juga berdampak pada industri terkait seperti bahan baku, logistik, dan jasa.
3. UMKM sering kali memimpin dalam hal kreativitas dan inovasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena ukurannya yang kecil, UMKM dapat dengan cepat mengembangkan solusi baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selain itu, banyak UMKM yang bekerja di sektor kreatif seperti sains, teknologi, dan desain, yang sangat penting untuk mendorong inovasi.
4. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Lokal: UMKM melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi daerah. UMKM sering berpartisipasi dalam rantai pasokan lokal dengan memanfaatkan tenaga kerja dan bahan baku lokal secara teratur. UMKM berkontribusi pada ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan dan tingkat produktivitas melalui operasi produksi dan penjualan. Selain itu, pemilik UMKM akan mengembalikan keuntungan mereka kembali ke masyarakat, memacu pembangunan dan bertindak sebagai katalisator bagi usaha-usaha perusahaan lainnya.
5. Diversifikasi ekonomi: Dengan mengembangkan berbagai sektor bisnis, UMKM berkontribusi pada diversifikasi ekonomi suatu negara. Hasilnya, ketergantungan pada satu sektor ekonomi yang penting akan berkurang, dan perekonomian akan terlindungi dari bahaya ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor.

²⁵ Fasa, Muhammad Iqbal, and Suharto Suharto. "Peran lembaga keuangan syari'ah dalam keberlangsungan umkm di tengah pandemi COVID-19." *Holistic Journal of Management Research* 6.2 (2021): 15-29.

6. Kontribusi terhadap Penerimaan Negara dan Pajak: UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan pajak. UMKM harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang relevan di banyak negara. Pemerintah dapat mendanai sejumlah industri, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya, dengan uang yang diterimanya dari sektor UMKM.²⁶

B. Dampak UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi

UMKM adalah bisnis yang mandiri dan menguntungkan yang beroperasi di semua sektor ekonomi dan memiliki landasan komunitas dengan modal yang sangat kecil. UMKM dapat dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau perusahaan.²⁷

Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan mayoritas perekonomian nasional dan merupakan katalisator pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor mikro, yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi. UMKM sejauh ini telah menunjukkan diri mereka sebagai sumber lapangan kerja yang dapat diandalkan dan memberikan nilai tambah di masa-masa sulit. Meningkatkan UMKM juga akan mendukung perusahaan-perusahaan lokal. Hal ini tidak hanya merupakan sumber bantuan yang tulus bagi pemerintah daerah yang menerapkan otonomi pemerintah, tetapi juga dapat mempercepat laju pemulihan ekonomi negara.²⁸

Kantor Kementerian Koperasi Indonesia (2022) melaporkan bahwa 65,46 juta UMKM, atau 99% dari seluruh perusahaan di Indonesia, mengalami pertumbuhan pada tahun 2019. Jumlah ini tumbuh 1,98% menjadi 64,19 juta unit dibandingkan dengan tahun 2018. Menurut statistik ini, UMKM mempekerjakan 119,56 juta orang di Indonesia pada tahun 2019. Selain itu, data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021 mengungkapkan bahwa 61,07% dari PDB Indonesia berasal dari UMKM di Indonesia. Temuan ini memberikan keyakinan bahwa UMKM dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan secara signifikan mendorong perekonomian Indonesia.

UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, terlibat dalam kegiatan komersial tertentu. Ini termasuk kebebasan mereka untuk mengganti barang yang mereka gunakan kapan pun mereka mau, kemampuan mereka untuk memindahkan tempat usaha mereka, kurangnya tugas administratif, kurangnya inovasi dalam sumber daya manusia (SDM), tingkat pendidikan

²⁶ Satriaji Vinatra, Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan masyarakat, *Jurnal Akuntan Publik*, Vol 1 No 3, 2023, h. 5-6.

²⁷ Gatut Susanta, Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), h. 13.

²⁸ Beny Johan, "Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung", (Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung, 2016), h. 99-101.

mereka yang relatif rendah, dan kurangnya izin usaha atau dokumentasi hukum secara keseluruhan. Tentu saja, dengan atribut yang beragam ini, UMKM menawarkan banyak keuntungan bagi bangsa atau masyarakat, seperti menjadi sumber utama produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, menawarkan solusi kelas menengah, dan memiliki operasi yang fleksibel. Pemerintah dan masyarakat lokal harus memanfaatkan beberapa keuntungan ini dengan baik. Untuk mempertahankan perekonomian Indonesia dan meningkatkan standar hidup, pemerintah harus dapat mendorong dan mendukung masyarakat untuk memulai usaha kecil, atau UMKM.

UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian bangsa. Hal inilah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, UMKM di Indonesia membantu fungsi ekonomi lokal negara ini dengan menarik lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di sektor UMKM menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mempertimbangkan untuk memulai usaha di sektor ini. Dengan demikian, UMKM membantu masyarakat dengan memungkinkan masyarakat untuk hidup berkecukupan dan kegiatan ekonomi dapat terus berjalan seperti biasa.²⁹

1. Mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan: UMKM memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari strata sosial ekonomi rendah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. UMKM dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan menciptakan lapangan kerja secara lokal, mendorong keterlibatan perempuan, dan membantu populasi yang terpinggirkan.
2. Pemberdayaan ekonomi: UMKM memungkinkan orang untuk memulai bisnis mereka sendiri dan mengejar karier kewirausahaan. Hal ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat menjadi lebih mandiri secara finansial, memiliki kendali lebih besar atas pendapatan mereka, dan tidak terlalu bergantung pada pekerjaan tradisional dengan memulai usaha sendiri.
3. Pertumbuhan ekonomi lokal: UMKM sering kali menjalankan bisnis lokal atau regional. Permintaan akan produk, jasa, dan bahan baku di daerah tersebut mungkin meningkat sebagai akibat dari kehadiran UMKM yang cukup besar di daerah tersebut. Hal ini dapat menghasilkan efek pengganda, di mana pertumbuhan satu UMKM menstimulasi pertumbuhan UMKM lainnya dan menguntungkan sektor ekonomi lainnya.

²⁹ Atsna Himmatul Aulia, peran usaha mikro dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 3 No 1, 2022, h. 68-69.

4. Peningkatan pendapatan dan konsumsi: Dengan menjalankan usaha produktif, UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan pengeluaran mengarah pada peningkatan kesejahteraan finansial bagi individu dan keluarga. Standar hidup dan kualitas hidup masyarakat juga terdampak secara positif.³⁰

KESIMPULAN

Setelah melalui berbagai pertimbangan, disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu bisnis yang dapat memperluas dan menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Dengan menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi pengangguran, UMKM mampu mengatasi berbagai tantangan ekonomi negara. Dukungan pemerintah dan keuangan harus diperluas untuk membantu UMKM mengatasi hambatan yang ada saat ini dan meningkatkan status mereka ke tingkat yang sangat strategis. UMKM sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan individu di seluruh Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong kemandirian industri dan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. UMKM berbagi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM kini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM mendorong kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan penciptaan lapangan kerja. UMKM mengurangi pengangguran, meningkatkan lapangan kerja lokal, mengentaskan kesenjangan ekonomi, dan memberikan akses kepada masyarakat yang kurang beruntung ke sistem keuangan. Agar UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya harus menyediakan fasilitas dan bantuan yang cukup bagi mereka. Pendanaan yang mudah diakses, pendidikan dan pelatihan bagi pemilik usaha, pemberdayaan teknologi informasi, perluasan jangkauan pasar, dan pengesahan undang-undang yang mendukung peraturan yang ramah UMKM adalah beberapa contoh dari dukungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rasalawati. 2001. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil*.
- Anoraga, Panji. *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana. 2010.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009.

³⁰ Satriaji Vinatra, Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan masyarakat, *Jurnal Akuntan Publik*, Vol 1 No 3, 2023, h. 6

- Bachtiar, Rifai. "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" *Jurnal Sosio Humaniora*. Vol 3. No.4. September 2012.
- Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: BI dan LPPI, 2015
- Edillius, dkk., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Peran lembaga keuangan syari'ah dalam keberlangsungan umkm di tengah pandemi COVID-19. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 15-29.
- Herriyanto. *Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Potensial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2008*. S1 Thesis UAJY : 2011.
- Himmatul, A. A. 2022. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi 3 (1).
- Johan, Beny. "Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung". (Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung. 2016.
- Karim, Adiwirman A. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2012.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional; Sasaran Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005.
- Kementerian Luar Negeri RI, Masyarakat ASEAN, Majalah Edisi 12 Juni 2016.
- M. Guntur, Effendi. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*. Jakarta: IKAPI, 2009.
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125-135.
- Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Syarifhidayatullah, Jakarta.
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Alfabeta: Bandung, 2010.
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 689-696.
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Puji Hastuti, et. al., (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*, (Medan: Yayasan Kita Menulis)
- Pujiono. *Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, t.th.

- Putra, Adnan Husadi. "Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora". *Jurnal Analisis Sosiologi*. VOL 5. No.2. Desember 2011.
- Rizky, Awalil. *Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia*, Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan. Jakarta: BMT Permodalan, 2008.
- Rofiah, K. (2010). Peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten ponorogo. *Kodifikasi*. 5(1), 147-168.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama. 2014..
- Susanta, Gatut. *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 2012
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Vinatra, S. 2023. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik* 1 (3).
- Wulansari, N., Wahyu, & Kurniawan, Y. (2017). *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM dan Good Governance di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis